

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta teori-teori dalam pembahasan maka dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang mana dalam hal ini dijelaskan beberapa pengertian menurut para ahli. Satori dkk (2011: 25) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar dibentuk dengan kata-kata berdasarkan Teknik pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini menganalisis tentang kemampuan Pendapatan Daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah di Kabupaten Jombang.

3.2 Definisi Operasional

Adapun fokus di dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Pada penelitian ini kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan beberapa analisis rasio berikut ini :

A. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Selisih menguntungkan (*Favourable Variance*), Sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak menguntungkan

(*Unfavourable Variance*). Perhitungan Analisis Varians Pendapatan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2010 : 137)

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasi Anggaran Pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

B. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Kinerja Keuangan APBD nya mengalami pertumbuhan secara positif dan kecenderungan (trend) meningkat. Sebaliknya, jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan akan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Pertumbuhan Pendapatan Daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Analisis Pertumbuhan pendapatan bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2010: 139) :

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t = \frac{\text{Pendapatan tahun } t - \text{Pendapatan tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan tahun } (t-1)} \times 100\%$$

Tabel 3. 1
Kriteria Penilaian Pertumbuhan Pendapatan

Kriteria Penilaian	Ukuran Pertumbuhan
Naik	Positif
Turun	Negatif

C. Derajat Desentralisasi

Daerah dengan Total Penerimaan Daerah Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari terselenggaranya desentralisasi fiskal adalah antara lain untuk memperkecil kesenjangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik. Derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus Rasio Derajat Desentralisasi (Mahmudi, 2010) :

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3. 2
Kriteria Rasio Desentralisasi Fiskal

Prosentase	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam (Bisma 2010)

D. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2010 : 142) :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Tabel 3. 3
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2002 dalam Kusuma (2014)

- a. Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah

E. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini mengukur kontribusi dana perimbangan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Semakin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah semakin tergantung pada dana dari pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan diwilayahnya. Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mardiasmo, 2009 : 165)

$$\text{Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3. 4
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD Terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri– Fisipol UGM, 2010

F. Rasio Efektivitas Pendapatan

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim dan Kusufi, 2012: 6). Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Abdul Halim, 2012) :

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. 5
Kriteria Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Dasril Munir dalam Yumardi

G. Analisis Varians Belanja

Selisih menguntungkan/disukai (Favourable Variance) terjadi saat realisasi belanja lebih kecil dari anggaran, sedangkan selisih yang tidak menguntungkan (Unfavourable Variance) terjadi jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya. Analisis Varians Belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2010: 157) :

$$\text{Varian} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Tabel 3. 6
Kriteria Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Sumber : Mahmudi (2016: 155)

H. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan

fiskal daerah. Analisis pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mahmudi,2010: 160) :

$$\text{Pertumbuhan belanja tahun } t = \frac{\text{Realisasi belanja tahun } t - \text{Realisasi tahun } (t-1)}{\text{Realisasi belanja tahun } (t-1)} \times 100\%$$

Tabel 3. 7
Kriteria Penilaian Pertumbuhan Belanja

Kriteria Penilaian	Ukuran Pertumbuhan
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber : Mahmudi (2016:158)

I. Rasio Belanja Operasi

Pada umumnya Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60%-90% Jika sesuai dengan Proporsi yang ditentukan maka dapat dikatakan seimbang tetapi jika lebih atau kurang dari proporsi yang ditentukan maka dapat dikatakan tidak seimbang. Rasio Belanja Operasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mahmudi,2010 : 164) :

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

J. Rasio Belanja Modal

Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5%-20% Jika sesuai dengan Proporsi yang ditentukan maka dapat dikatakan seimbang tetapi jika lebih atau kurang dari proporsi yang ditentukan maka dapat dikatakan tidak seimbang (Mahmudi, 2010 dalam penelitian Pramita, 2015). Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2010 : 165)

:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Modal}} \times 100\%$$

K. Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2016:164) Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih 100% maka mengidentifikasi telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio Efisiensi Belanja daerah dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:166)

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3. 8
Kriteria Efisiensi Belanja Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Efisien
Tidak efisien	>100%
Kurang efisien	90%-100%
Cukup efisien	80%-90%
Efisien	60%-80%
Sangat Efisien	<60%

3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, dan landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan..

3.3.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen berupa

laporan yaitu laporan realisasi anggaran tahun 2016-2020 dan laporan APBD tahun anggaran 2016-2020.

3.3.3 Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah dimana pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

2. Metode Dokumentasi

Metode yang dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen).

3.4 Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data supaya pengumpulan data tersebut sistematis dan mudah. Instrumen penelitian merupakan suatu yang amat penting dan strategi kedudukannya dan keseluruhan kegiatan penelitian. Dengan instrument akan diperoleh data yang merupakan bahan penting untuk menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan dan membuktikan hipotesis. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh 9dminist-variabel yang ada dalam hipotesis.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan sebuah pemilihan, penyederhanaan, pemusatan, dan transformasi data terhadap data yang dihasilkan atau yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Pada saat pengumpulan data berlangsung, akan terjadi tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan membuat body note. Ini terjadi sampai penyelesaian laporan akhir penelitian. Reduksi data dalam penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk proses pemilihan, pengeditan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Data-data yang direduksi diharapkan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah penulis dalam melaksanakan analisis terakhir.

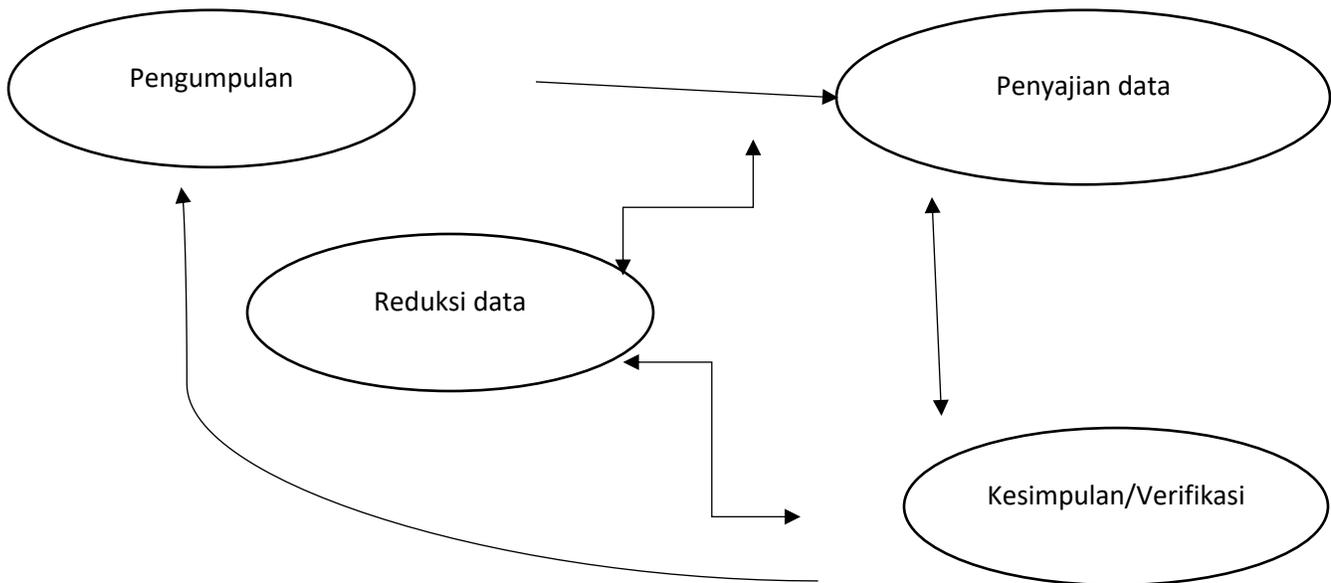
3. Penyajian data

Setelah reduksi data dilakukan, maka proses selanjutnya adalah menyajikan data atau analisis data. Dalam penyajian penelitian kualitatif ini biasanya sering bersifat teks dan naratif yang diharapkan dapat memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dalam merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah melaksanakan sebuah penelitian dengan memperhatikan hasil observasi atau wawancara yang telah dilakukan, dokumentasi yang dimiliki yaitu data-data awal yang belum siap digunakan untuk analisis setelah data tersebut direduksi dan disajikan. Tahap awal peneliti berusaha memperoleh makna dari data yang dikumpulkan, kemudian dibuat pola, model, tema,

hubungan, persamaan terhadap hal-hal yang sering muncul. Dari data yang telah melalui tahapan diatas, diambil satu kesimpulan dan bersifat sementara. Apabila diperlukan akan dilakukan verifikasi data dengan cara mengumpulkan data baru guna memperkuat kesimpulan atau menetapkan kesimpulan.



Gambar 3. 1 Komponen dalam Analisis Data

Sumber : Sugiyono (2011 : 338)